



4.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal	75%	72,77% (masih menunggu data resmi dari BPK utk thn 2025)
5.	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	75%	74,32% (masih menggunakan data thn 2024, krn belum rilis dari BPK utk thn 2025)
6.	Peningkatan Kebabılıtan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,15	2,558 (masih menggunakan data thn 2024, krn belum rilis dari BPKP utk thn 2025)

3.2.8. Unsur Pemerintahan Umum

8.01. Kesatuan Bangsa dan Politik

- 1) Tujuan dan Sasaran
- a. Tujuan yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo

- Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM
- b. Sasaran dan Program

- Terciptanya keamanan dan stabilitas daerah

Tabel 3.246

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2025		Persentase
			Target (%)	Realisasi (%)	
1	Sasaran : Terciptanya keamanan dan stabilitas daerah	Indikator sasaran : Persentase Stabilitas Keamanan, Politik dan Penguatan Wasbang Yang Difasilitasi	100	100	100
	Program: Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Indikator program Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	100	100
	Program : Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Indikator program : Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100	100	100
	Program : Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Indikator Program : Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	100	100	100
	Program : Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Indikator Program : Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi	100	100	100
	Program : Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Indikator Program : Persentase Penanganan Konflik yang Terdeteksi	100	100	100
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indikator Program : Presentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100



2) Program dan Kegiatan

Tabel 3.247
 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pemerintahan
 Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Pagu 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Anggaran	Keu	Fisik		
			(Rp)	(%)	(%)		
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.272.580.500,-	1.253.818.562,-	98,53	100	Pelaksanaan Program kegiatan berjalan baik	Mengoptimalkan sinkronisasi kebijakan
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.272.580.500,-	1.253.818.562,-	98,53	100	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik	Menjaga kesesuaian antara tujuan, output, dan alokasi anggaran sub kegiatan.
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	506.007.758,-	487.751.407,-	96,39	100	Pelaksanaan sub kegiatan berjalan dengan baik secara terencana dan terkoordinasi	Melaksanakan sub kegiatan sesuai dengan perencanaan, jadwal, dan ketentuan yang telah ditetapkan.
	Pelaksanaan tugas Paskibraka	766.572.742,-	766.067.155,-	99,93	100	Pelaksanaan sub kegiatan berjalan dengan baik secara terencana dan terkoordinasi	Terus menjaga koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan dan pemangku kepentingan terkait
2.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3.219.850.468,-	3.075.505.036,-	95,52	100	Telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik	Koordinasi yang efektif antar pemangku kepentingan, kesiapan sumber daya pelaksana, serta partisipasi aktif dari partai politik dan lembaga pendidikan. Kegiatan yang dilaksanakan mampu mendukung peningkatan pemahaman politik masyarakat, penguatan etika dan budaya politik yang demokratis, serta tercapainya sasaran dan target program sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik,	3.219.850.468,-	3.075.505.036,-	95,52	100	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik melalui koordinasi lintas sektor, pemanfaatan data dan informasi aktual, serta pemantauan situasi politik	Upaya yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan tetap berjalan dengan baik adalah melalui penguatan koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah



	Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemantauan Situasi Politik					secara berkelanjutan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang responsif dan akuntabel	dan pemangku kepentingan terkait guna menjamin keselarasan pelaksanaan program
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	255.436.000,-	130.922.071,-	51,25	100	Keterbatasan efektivitas penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang politik sehingga capaian realisasi keuangan tidak maksimal	Penyempurnaan Mekanisme Pelaksanaan dan Penjadwalan Kegiatan Menyusun jadwal kegiatan yang lebih realistis dan adaptif terhadap dinamika politik. Mengantisipasi potensi hambatan regulasi maupun situasi politik yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan.
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.542.567.668,-	1.524.797.698,-	98,85	100	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik secara terencana dan terkoordinasi	Melaksanakan pemantauan rutin agar setiap tahapan kegiatan tetap sesuai rencana.
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.421.846.800,-	1.419.785.267,-	99,86	100	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik	Memastikan pelaksanaan kebijakan yang responsif terhadap dinamika politik dan kebutuhan masyarakat di daerah
3.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.197.734.492,-	1.197.602.670,-	99,99	100	Pelaksanaan Program berjalan dengan baik sesuai rencana yang telah ditetapkan	Melakukan monitoring rutin terhadap pelaksanaan program untuk mendeteksi hambatan atau potensi risiko sedini mungkin
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.197.734.492,-	1.197.602.670,-	99,99	100	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik	Menyusun kebijakan berbasis data dan kebutuhan nyata ormas, sehingga regulasi dan pedoman lebih fasilitasi lebih



							relevan dan implementatif
	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.197.734.492,-	1.197.602.670,-	99,99	100	Pelaksanaan sub kegiatan berjalan dengan baik	Menggunakan data pendaftaran, evaluasi ormas, dan informasi situasi ormas di daerah sebagai dasar perencanaan
4.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	37.581.000,-	37.570.564,-	99,97	100	Pelaksanaan Program berjalan dengan baik sesuai rencana yang telah ditetapkan	Monitoring dan evaluasi untuk memastikan keberhasilan program
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	37.581.000,-	37.570.564,-	99,97	100	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik	Monitoring dan Evaluasi Rutin Memastikan kegiatan berjalan sesuai target
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	37.581.000,-	37.570.564,-	99,97	100	Pelaksanaan sub kegiatan berjalan baik	Koordinasi Lintas Sektor: Pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama dalam mewujudkan ketahanan ekonomi, sosial, budaya seta memfasilitasi Forum Kerukunan umat beragama
5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.672.199.500,-	1.449.123.922,-	86,66	100	Koordinasi lintas sektor belum maksimal	Mengoptimalkan koordinasi lintas sektoral
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.672.199.500,-	1.406.623.922,-	84,12	100	Keterbatasan Kualitas SDM	Perlunya Penguatan Kualitas SDM melalui pelatihan dan diklat intelijen
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	37.839.500,-	36.570.200,-	96,65	100	Pelaksanaan Sub kegiatan berjalan dengan baik	Meningkatkan kewaspadaan dini terhadap ancaman yang mengganggu keamanan dan ketertiban daerah
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di	168.000.000,-	165.470.736,-	98,49	100	Pelaksanaan Sub kegiatan berjalan dengan baik	Melakukan Pemetaan titik rawan konflik atau ancaman keamanan



	Daerah						
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1.466.360.000,-	1.247.082.986,-	85,05	100	Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan sub kegiatan dan Kegiatan tidak terjadwal dengan baik, sehingga realisasi keuangan tidak terserap baik	Mengoptimalkan agenda rapat forkompinda
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6.299.367.143,-	5.758.581.700,-	91,42	100	Pelaksanaan Program kegiatan berjalan dengan baik	Menyusun rencana kerja dengan prioritas jelas antara program inti dan penunjang
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.400.000,-	45.346.600,-	99,88	100	Pelaksana kegiatan berjalan dengan baik	Perbaikan perencanaan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.400.000,-	45.346.600,-	99,88	100	Pelaksana sub kegiatan berjalan dengan baik	Melakukan sinkronkan dokumen PD dengan RPJMD, RKPD, dan kebijakan nasional
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.355.481.495,-	4.843.023.312,-	90,43	100	Pelaksana kegiatan berjalan dengan baik	Peningkatan SDM dalam mengelola administrasi keuangan daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.676.339.495,-	4.197.368.053,-	89,76	100	Pelaksana sub kegiatan berjalan dengan baik	Percepatan pencairan gaji pegawai dan peningkatan akurasi data pegawai
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	679.142.000,-	645.655.259,-	95,07	100	Pelaksana sub kegiatan berjalan dengan baik	Pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan koordinasi dan peningkatan SDM
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.486.000,-	18.440.100,-	99,75	100	Pelaksana kegiatan berjalan dengan baik	Penyelarasan diklat dengan tugas dan fungsi serta peningkatan kapasitas SDM
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	18.486.000,-	18.440.100,-	99,75	100	Pelaksana sub kegiatan berjalan dengan baik	Menganalisis kebutuhan Diklat berbasis jabatan dan fungsi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	292.091.581,-	291.011.553,-	99,63	100	Pelaksana kegiatan berjalan dengan baik	Pelaksanaan koordinasi internal dan peningkatan SDM
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	292.091.581,-	291.011.553,-	99,63	100	Pelaksana sub kegiatan berjalan dengan baik	Perencanaan kebutuhan dan optimalisasi anggaran
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	587.908.067,-	560.760.135 ,-	95,38	100	Pelaksana kegiatan berjalan dengan baik	Perencanaan jasa penunjang dan peningkatan SDM
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	587.908.067,-	560.760.135 ,-	95,38	100	Pelaksana sub kegiatan berjalan dengan baik	Perencanaan pengadaan jasa serta Peningkatan Kualitas Penyedia Jasa
	Jumlah	13.699.313.10,-	12.772.202.454 ,-	93,23	100		-

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Outcome dari program ini adalah persentase capaian penguatan wasbang & cinta tanah air serta nilai-nilai pancasila

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Output dari kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilakukan secara tatap muka dalam rangka penguatan wawasan kebangsaan dan Cinta Tanah Air bagi pelajar SMA/SMK sederajat, mahasiswa, Ormas dan masyarakat. Selain itu pula dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan serta nilai-nilai pancasila terdapat kegiatan berupa Upacara peringatan hari besar nasional : Hari Patriotik 23 Januari, Hari Lahir Pancasila, Renungan Suci memperingati HUT Proklamasi dan Hari Pahlawan (Kirab Patriotik, Upacara Patriotik 23 Januari, Ziarah Rombongan TMPN Nani Wartabone, Upacara Lahir Pancasila, Upacara Bendera HUT Proklamasi, Renungan Suci, Penguatan Paskibraka, Hari Pahlawan dan Ziarah TMPN).

Sebagaimana target pelaksanaan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan dan Cinta Tanah Air sebanyak 75 orang peserta dan telah terealisasi sesuai dengan target.

- Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka

Output dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen pelaksanaan tugas paskibraka, pelaksanaan kegiatan ini terkait membentuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Provinsi Gorontalo sama seperti wilayah lain yang mengadakan seleksi untuk anggota Pasukan pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) yang dilaksanakan disetiap tahunnya untuk semua siswa SMA/SMK, MA sederajat di wilayah Provinsi Gorontalo. Seluruh anggota Paskibraka dituntut untuk melewati beberapa tahapan seleksi yang diawali dari Tingkat sekolah, Tingkat Kabupaten dan Kota, serta Ketingkat Provinsi dan Nasional sesuai Petunjuk Tehknis yang merujuk pada Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2022 dan Peraturan BPIP No. 3 Tahun 2022 tentang Kepaskibrakaan. Untuk itu pada tahapan seleksi ini di harapkan bisa memperoleh para calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka baik di Tingkat Provinsi maupun yang dikirim ke Tingkat Nasional benar – benar memiliki fisik, mental dan kemampuan yang baik.

Terkait pembentukan Paskibraka sebagaimana target pelaksanaan kegiatan sebanyak 25 orang peserta dan telah terealisasi sesuai dengan target.

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Outcome dari program ini adalah Persentase Peningkatan Partisipasi Pemilih

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,

Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

- Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Output kegiatan ini adalah jumlah kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah yang disusun dari rapat tim pengkaji dan tim internal Badan Kesbangpol serta pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk memperoleh data kualitatif yang mendalam, memvalidasi data kuantitatif, mengidentifikasi tantangan dan potensi perbaikan demokrasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih relevan dan tepat sasaran bagi pemerintah daerah dan pusat, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti media, LSM, dan akademisi untuk mendapatkan perspektif komprehensif. Sesuai target yang direncanakan 6 dokumen dan telah terealisasi melalui hasil dalam rapat pembahasan tim pengkaji yakni 6 dokumen terkait kajian tentang Kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan rumusan tentang perkembangan demokrasi FGD IDI untuk memastikan data Indeks Demokrasi Indonesia mencerminkan realitas demokrasi yang sebenarnya dan dapat digunakan secara efektif untuk membuat kebijakan yang lebih baik

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Output dari kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah yang memperoleh pemahaman tentang pendidikan politik melalui tatap muka dengan target yakni 100 orang. Selain itu dalam pelaksanaan sub kegiatan ini telah dilaksanakan penyaluran bantuan keuangan partai politik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 420/31/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024 tentang Rincian Besaran Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Periode 2024-2029 Berdasarkan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilu Tahun 2024. Adapun 10 Partai Politik yang menerima bantuan keuangan partai politik sebagai berikut:



Tabel 3.248

Daftar Partai dan Perolehan Suara hasil Pemilu Tahun 2024-2029

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARAH SAH	BESARAN BANTUAN PER SUARA	JUMLAH BANTUAN PARTAI POLITIK
1	Partai Kebangkitan Bangsa	38.326	Rp. 1.643	Rp. 62.969.618
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	74.904	Rp.1.643	Rp123.067.272
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	104.739	Rp.1.643	Rp172.086.177
4	Partai Golongan Karya	112.316	Rp.1.643	Rp184.535.188
5	Partai Nasional Demokrat	109.583	Rp.1.643	Rp180.044.869
6	Partai Keadilan Sejahtera	62.712	Rp.1.643	Rp103.035.816
7	Partai Persatuan Pembangunan	76.266	Rp.1.643	Rp125.305.038
8	Partai Amanat Nasional	52.812	Rp.1.643	Rp86.770.116
9	Partai Hati Nurani Rakyat	21.937	Rp.1.643	Rp36.042.491
10	Partai Demokrat	46.081	Rp.1.643	Rp75.711.083
Jumlah		699.676	Rp.1.643	Rp1.149.567.668

Dalam penyaluran bantuan keuangan partai politik ini dilakukan verifikasi oleh tim berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 74/31/II/2025, tanggal 25 Februari 2025 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2025..

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah terkait dengan perkembangan situasi politik di Provinsi Gorontalo agar situasi yang tercipta kondusif dan damai. Untuk target capaian ini 7 laporan sedangkan realisasi mencapai 30 laporan.

3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Outcome dari program ini adalah persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.



- Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Output dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen program kerja dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah yang disusun, terkait pelaksanaan kegiatan yakni penguatan dan pengawasan serta verifikasi ormas dan 1 dokumen database Ormas yang terhimpun dalam Buku Direktori Organisasi Kemasyarakatan. Dengan target capaian 23 dokumen dan realisasi 30 dokumen penguatan dan pengawasan serta verifikasi ormas tahun 2025.

Daftar Ormas yang terdaftar di Badan Kesbang dan Politik Prov. Gorontalo Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.249
 Daftar Ormas yang terdaftar Prov. Gorontalo

No	Bentuk Ormas	Status SKT/AHU	Jumlah
1	Berbadan Hukum A. Perkumpulan B. Yayasan	Aktif	134
		Aktif	108
		Aktif	26
2	Tidak Berbadan Hukum	Aktif	50
Jumlah			184

Berdasarkan data diatas jumlah Ormas yang terdaftar 184, memiliki Badan Hukum Aktif 134 dan tidak berbadan hukum aktif 50 ormas.

Selain itu terdapat penyaluran dana hibah kepada organisasi massa dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo pada tahun anggaran 2025 sesuai :

- Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 51/31/II/2025 Penerima Hibah Berupa Uang Kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2025
 - Surat Keputusan Gubernur Gorontalo nomor 197/31/VII/2025 tentang Penetapan Hibah Berupa Uang Kepada Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Indonesia Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2025
- Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Outcome dari program ini adalah pelaksanaan monitoring tentang ketersediaan sembako dan bahan bakar minyak (BBM) serta pemantauan situasi dalam mencegah penyakit masyarakat

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

- Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

Output dari kegiatan ini adalah jumlah kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang disusun terkait dokumen laporan perkembangan stabilitas dan ketersediaan sembako serta Bahan Bakar Minyak (BBM), pelaksanaan kegiatan dengan target 12 dokumen setiap bulan.

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Outcome dari program ini adalah persentase potensi konflik yang terdeteksi.

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial

- Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Output dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah yang disusun. Adapun penyusunan dokumen dimaksud diselenggarakan melalui kegiatan sebagai berikut:

Penyusunan dokumen capaian rencana aksi penanganan konflik sosial yang dihimpun dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab/Kota dan Provinsi Gorontalo serta instansi vertikal, selanjutnya dievaluasi oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (TPKS) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dokumen dimaksud yakni 3 (tiga) dokumen rencana aksi yaitu:

- Dokumen data dukung B.04 (Jan-April)
- Dokumen data dukung B.08 (Mei-Agustus)
- Dokumen data dukung B.12 (Sept-Des)

Capaian rencana aksi hasilnya 110% menempati peringkat 1 Nasional, sedangkan untuk rekapitulasi capaian B.08 hasilnya 115% menempati peringkat 2 Nasional. Untuk B.12 tahun 2025 sampai dengan saat ini belum dipublikasi oleh Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional Kementerian Dalam Negeri. Berikut capaian data evaluasi renaksi:



Tabel 3.250
 Evaluasi Capaian Renaksi

CAPAIAN TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2025
Evaluasi B.04 : 75 % Evaluasi B.08 : 87 % Evaluasi B.12 : 110 %	Evaluasi B.04 :110 % Evaluasi B.08 : 115 % Evaluasi B.12 : Belum dirilis

- b. Kegiatan pengawasan orang asing melalui rapat koordinasi, dalam rapat koordinasi dengan agenda membahas penguatan tim pemantauan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing di Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dilaksanakan pada 15 Oktober 2025 bertempat di Aula Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo menghadirkan pemateri Tim Pengawasan Orang Asing Provinsi Gorontalo yakni Divisi Keimigrasian Kemenkumham Provinsi Gorontalo dan Polda Gorontalo.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- Output dari kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah.
- Dalam penyusunan laporan ini melalui kegiatan sebagai berikut:
- a) Pemantauan terkait deteksi dini dan cegah dini potensi konflik yang terjadi diwilayah Kab/Kota Se – Provinsi Gorontalo dan luar Provinsi Gorontalo, dengan menyusun laporan per triwulan tahun 2025.
 - b) Kegiatan rapat koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah dengan agenda sebagai berikut:
 - Membahas Program Pemerintah Makan Bergizi Gratis dan 100 hari kerja Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden serta Antisipasi ATHG jelang pelantikan kepala daerah terpilih di Provinsi Gorontalo, Kamis 30 Januari 2025 bertempat di Grande Bistro, Jl. Medi Botutihe, Kel. Heledulaa, Kec. Kota Timur, kota Gorontalo;
 - Pembahasan Terkait dalam rangka antisipasi kerawanan jelang Ramadhan 1446 H dan Gerakan Indonesia Gelap di Wilayah Gorontalo Rabu, 19 Februari 2025 bertempat di Ballroom Ipilo Hotel Yulia Kota Gorontalo;
 - Pembahasan perkembangan Dalam Rangka Antisipasi PSU di Kab. Gorontalo Utara dan Ketersediaan Sembako Jelang Idul Fitri 1446 H, Selasa, 18 Maret 2025 di Aula Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo;

- Pembahasan kesiapan pelaksanaan PSU Pilkada Kab. Gorontalo Utara dan kegiatan May Day dan Aneksasi Papua, Sabtu 12 April 2025 di Ruang Rapat Domestique Kota Gorontalo;
 - Pembahasan Antispasi Potensi AGHT dan Kerawanan Hasil sengketa PSU Pilkada Gorut, Kendala Penyelesaian PSN Bendungan Bolango Ulu dan percepatan Program MBG serta Antisipasi Penyakit Hewan Kurban di Provinsi Gorontalo, Selasa 20 Mei 2025 tempat Cafe Domestiq Kota Gorontalo;
 - Rapat koordinasi pada Rabu 18 Juni 2025 bertempat di Domestique Jl. Arif Rahman Hakim Kel. Wumialo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo membahas:
 - Pembahasan antisipasi potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) dan kerawanan pergerakan mahasiswa papua jelang peringatan 1 Juli Tahun 1971 di Provinsi Gorontalo,
 - Penyelesaian sengketa Lahan dan Masalah Lainnya Antara Pt.GM dan Masyarakat maupun PT. PETS dan Masyarakat di Provinsi Gorontalo
- c) Isu Sitkam lainnya di Provinsi Gorontalo
- Rapat koordinasi pada Rabu 20 Agustus 2025 Tempat Domestique Jl. Arif Rahman Hakim Kel. Wumialo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo. Dengan agenda pembahasan: 1. Percepatan penyelesaian Program Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bulango Ulu di Kab. Bone Bolango; 2. Penanganan ancaman separatisme papua menyikapi maraknya kasus intoleransi yang terjadi di beberapa wilayah indonesia; 3. Penanggulangan aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di Provinsi Gorontalo;
 - Rapat koordinasi pada Rabu 17 September 2025 Tempat Domestique Jl. Arif Rahman Hakim Kel. Wumialo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo. Dengan agenda pembahasan: 1. Perkembangan situasi keamanan terkait September Hitam di wilayah Provinsi Gorontalo, 2. Perkembangan dan permasalahan Makan Bergizi Gratis di wilayah Provinsi Gorontalo, 3. Isu radikalisme dan aliran kepercayaan di Provinsi Gorontalo;
 - Rapat koordinasi pada Selasa, 14 Oktober 2025 bertempat di RM. Zarona Jl. Sudirman Kel. Wumialo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo. Dengan agenda pembahasan: 1. Perkembangan situasi keamanan jelang satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo-Gibran di lingkungan Provinsi Gorontalo dan 2. Permasalahan Distribusi BBM / LPG di wilayah Gorontalo;
 - Rapat koordinasi pada Kamis, 13 Nopember 2025 14 Oktober 2025 Tempat Domestique Jl Arif Rahman Hakim Kel. Wumialo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo. Dengan agenda pembahasan 1. aktivitas masyarakat Papua di Provinsi Gorontalo, 2. masalah tenaga kerja dan upah buruh dan 3. perkembangan situasi terutama isu-isu lainnya yang berpotensi ATHG di wilayah Provinsi Gorontalo;

- Rapat koordinasi pada Selasa, 9 Desember 2025 Tempat Domestique Jl Arif Rahman Hakim Kel. Wumialo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo. Dengan agenda pembahasan : 1. Antisipasi kerawanan dan potensi ATHG wilayah Provinsi Gorontalo dan 2. Pemantauan arus mudik serta fluktuasi harga bahan pokok jelang natal dan tahun baru di Provinsi Gorontalo.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi
Output dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah provinsi melalui rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), terlaksananya kegiatan rapat ini dalam tahun anggaran 2025 sebanyak 14 (Empat belas) kali dari target 6 kali pelaksanaan rapat. Pelaksanaan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo untuk memastikan situasi senantiasa aman dan nyaman bagi keberlangsungan pembangunan daerah, adapun pelaksanaannya sebagai berikut :
 - Rapat Forkopimda terbatas dalam rangka terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kab. Gorontalo Utara dan Ketersediaan Sembako pada saat Ramadhan 1446 H, Senin 3 Maret 2025 bertempat di aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo;
 - Gubernur Gorontalo Bersama Forkopimda melaksanakan Peninjauan Ketersediaan Gas LPG di PT. Dua Bersaudara Kec. Telaga dan Peninjauan Ketersediaan Bahan Pokok di Pasar Tradisional Limboto Kab. Gorontalo dalam Menghadapi Ramadhan Dan Idul Fitri 1446 H, Sabtu, 22 Maret 2025.
 - Gubernur Gorontalo Bersama Forkopimda melaksanakan Peninjauan Arus Mudik dan Aktivitas Layanan Penumpang Kapal Laut di Pelabuhan Pelindo Kota Gorontalo, Minggu, 23 Maret 2025.
 - Gubernur Gorontalo Bersama Forkopimda melaksanakan Peninjauan Kesiapan PSU Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara di Kantor Bupati Gorontalo Utara, Kantor Bawaslu Gorontalo Utara dan Kantor Komisi Pemilihan Umum Gorontalo Utara, Selasa, 8 April 2025.
 - Gubernur Gorontalo Bersama Forkopimda melaksanakan Pelepasan Logistik PSU-MK Pemilukada 2024 dan Kesiapan TPS Pemilukada Kab. Gorontalo Utara, Jumat, 18 April 2025 di Kantor KPU Kab. Gorut. Adapun TPS yang dikunjungi : TPS 002 Desa Poso Kec. Kwandang, TPS 003 Desa Titidu Kec. Kwandang dan TPS 003 Desa Moluo Kec. Kwandang.
 - Gubernur Gorontalo Bersama Forkopimda melaksanakan Rapat Forkopimda Diperluas dalam rangka Terkait Pembahasan Pertambangan dan Dinamika Isu-Isu Lainnya, Jumat 16 Mei 2025 bertempat di Restoran Angelato Kota Gorontalo.
 - Gubernur Gorontalo Bersama Forkopimda melaksanakan Rapat Forkopimda Diperluas dalam rangka Terkait Pembahasan progres Program MBG. Progres PSN

Bendungan Bulango Ulu dan Proses Persertifikasian Lahan Brigif Otamana, Rabu 4 Juni 2025 bertempat di RM. Oceana & Resto Kota Gorontalo.

- Gubernur Gorontalo Bersama Forkopimda melaksanakan Rapat Forkopimda Terbatas Dalam Rangka Antisipasi Perkembangan Situasi Terkini, Minggu, 31 Agustus 2025. Bertempat di Rujab Gubernur Gorontalo.
- Gubernur Gorontalo Bersama Forkopimda melaksanakan Rapat Forkopimda Diperluas Dalam Rangka Kesiapan Pelaksanaan Perkemahan Antar Satuan Karya Nasional Tahun 2025 di Provinsi Gorontalo, Jumat, 26 September 2025. Bertempat di Rujab Gubernur Gorontalo.
- Gubernur Gorontalo Bersama Forkopimda melaksanakan Rapat Forkopimda Diperluas Dalam Rangka Penyelesaian Tali Asih Penambang di Kawasan Pani Gold dan Izin Pertambangan Rakyat Tahun 2025 di Provinsi Gorontalo, Kamis, 30 Oktober 2025. Bertempat di Rujab Gubernur Gorontalo.
- Gubernur Gorontalo Bersama Forkopimda melaksanakan Rapat Forkopimda Dalam Rangka pembahasan Pelaksanaan Gorontalo Half Marathon (GHM) Provinsi Gorontalo dan perkembangan situasi dan isu-usu terkini di Provinsi Gorontalo, Selasa, 25 November 2025. Bertempat di Rujab Gubernur Gorontalo.
- Gubernur Gorontalo Bersama Forkopimda melaksanakan Rapat Forkopimda Dalam Rangka Rapat Forkopimda di perluas dalam rangka kesiapan libur natal tahun 2025 dan tahun baru 2026 serta antisipasi bencana hidrometeorologi di wilayah Gorontalo, Rabu, 10 Desember 2025. Bertempat di Angelato Resto dan Café Jl. Sultan Hasanudin Kel Biawao Kec. Kota selatan kota Gorontalo.
- Gubernur Gorontalo Bersama Forkopimda melaksanakan Rapat Forkopimda Pada hari Rabu, 10 Desember 2025. Pukul 13.00 wita. Bertempat di Angelato Resto Kota Gorontalo. Telah dilaksanakan Rapat Forkopimda Diperluas Provinsi Gorontalo. Dengan Agenda Rapat :
 - Kesiapan Libur Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2025
 - Antisipasi Bencana Hidrometeorologi di Wil. Provinsi Gorontalo
 - Peninjauan Kesiapan Pospam Natal & Tahun Baru 2024 tanggal 24 Desember 2025 di Kota Gorontalo

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari program ini adalah Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan.

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Output dari kegiatan ini adalah 2 (dua) jumlah dokumen perencanaan yang terdiri dari perencanaan penganggaran dan evaluasi pelaksanaan anggaran melalui program dan kegiatan. Selain itu pula evaluasi hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat BB untuk tahun 2025.



- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

 - Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 Output dari kegiatan ini adalah penyediaan gaji dan tunjangan ASN lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo yang dilakukan pembayaran setiap bulan.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 Output dari kegiatan ini adalah Jumlah laporan keuangan triwulan dan tahunan dalam rangka pengawasan penatausahaan keuangan.
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

 - Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 Output dari kegiatan ini adalah jumlah pegawai yang mengikuti diklat dan bimtek dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo. Dalam rencana kerja 2025 ditargetkan 6 orang yang mengikuti diklat dan yang terealisasi 14 orang.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Output dari kegiatan ini adalah jumlah sarana dan prasarana kantor yang memadai. Selain itu pula dalam mendukung pemeliharaan sarana prasarana perkantoran yakni berupa pemeliharaan gedung dan kantor, operasional dan pengadaan barang dan jasa kantor.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Output dari kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa dalam pelaksanaan pelayanan jasa kantor, sebagaimana dalam target 8 jasa dan terealisasi 8 jasa meliputi belanja jasa keamanan, kebersihan, tagihan listrik, tagihan air, telpon, Jasa Pengolahan Sampah, belanja TV Berlangganan dan Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan kendaraan bermotor.
- 3) Indikator Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029, khusus Tahun 2025

Tabel 3.251
 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2025

No.	INDIKATOR KINERJA	Capaian Tahun 2025	
		TARGET	REALISASI
1	Indeks Demokrasi Indonesia	74,60	74,57
2	Persentase Stabilitas Keamanan, Politik dan Penguatan Wasbang Yang Difasilitasi	100 %	100 %



Untuk hasil penilaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2025 belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo dikarenakan akan dirilis pada Tahun 2026, sehingga data yang disajikan diatas masih menggunakan hasil IDI tahun 2024 yakni 74,57.

- 4) Penghargaan Nasional yang diterima OPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025
- Pelaporan rekapitulasi capaian rencana aksi daerah B.04 dan B.08 Provinsi Gorontalo mencapai Peringkat 1 Nasional diangka 113% berdasarkan hasil penilaian Tim Penanganan Konflik Sosial Pusat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

Grafik 3.24
 Rekapitulasi Capaian RAD Periode B.04 dan B.08 Tahun2025

